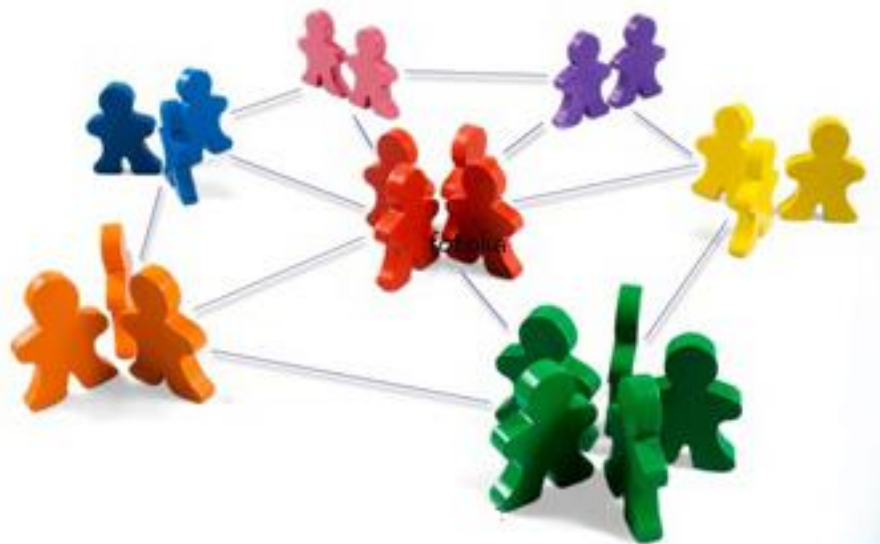


LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN 2015

BIRO KEUANGAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Visi BK UB

Menjadi pusat pelayanan di Bidang Administrasi Keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel, untuk mendukung Universitas Brawijaya menuju *World Class Entrepreneur University*.

Misi BK UB

1. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan institusi yang transparan dan akuntabel.
3. Mengembangkan kapabilitas dan kompetensi SDM dalam rangka menciptakan profesionalisme di Bidang Keuangan.
4. Memberikan pelayanan prima dalam pengelolaan aset untuk mendukung terselenggaranya kegiatan operasional perguruan tinggi.

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Tinjauan Manajemen
2. Nama Unit : Biro Keuangan
3. Nama Institusi : Universitas Brawijaya
4. Penanggungjawab : Drs. Syarif Utomo, MM
5. Koordinator Penyusun : Drs. Suhartono
6. Anggota Penyusun :
 - 1) Drs. Sagiya
 - 2) M. Alfian Choirudin, S.Sos
 - 3) Fajar Andy Kurniawan, SE
 - 4) Ringgih Swasmita A., A.Md
 - 5) Amalia Hadiyana, SE
 - 6) Martha Wartini, SE
 - 7) Siti Kumalasari Cahyaningsih, A.Md
7. Periode : Januari s.d Desember Th. 2015

Malang, 3 Mei 2016
Kabiro. Keuangan,

Drs. Syarif Utomo, MM
NIP. 19581220 198103 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
I. PENDAHULUAN	1
II. LINGKUP BAHASAN.....	1
III. PELAKSANAAN	1
IV. HASIL.....	2
1. Hasil Audit Internal.....	2
2. Hasil Audit Eksternal.....	5
3. Umpan Balik Pelanggan	6
4. Kinerja dan Evaluasi Proses	6
5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan.....	8
6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya	9
7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM.....	9
8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM.....	10
V. PENUTUP	11

I. PENDAHULUAN

Biro Keuangan (BK) adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Secara umum Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi keuangan di lingkungan universitas.

Manajemen BK UB meninjau SMM organisasi secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka *Biro Keuangan* melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam *Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 8 Tahun 2015 dan temuan-temuan Surveillance Visit 1 & 2 ISO 9001:2008 oleh Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)*.
2. Umpan balik pelanggan, meliputi hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan kompilasi keluhan pelanggan PJM.
3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.
4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal).
7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.

III. PELAKSANAAN

Pelaksanaan tinjauan manajemen dimulai dengan pengumpulan data terkait program BK oleh masing-masing bagian dengan mengacu kepada sasaran mutu BK, yaitu dimulai sejak tanggal 27 Januari 2016 hingga tanggal 20 Februari 2016. Masing-masing bagian diberi waktu untuk membahas capaian sasaran mutu masing-masing. Hasil pembahasan tersebut disertai dengan uraian hambatan, koreksi dan pencegahan/terobosan baru yang dilakukan dalam pelaksanaan program-programnya. Hasil

pembahasan tersebut disampaikan kepada Kabag. Akuntansi, selaku MR, untuk dilakukan kompilasi dan analisis efektifitas dan efisiensi sistem.

IV. HASIL

Hasil evaluasi manajemen *Biro Keuangan* Tahun 2015 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II).

1. Audit Internal Mutu (AIM)

Biro Keuangan (BK) juga diaudit melalui mekanisme AIM UKPPA Siklus 8 Tahun 2015, yaitu pada hari Senin-Selasa, tanggal 29-30 Juni 2015. Auditor internal yang bertugas mengaudit BK adalah Prof.Dr.Ir.Hartutik,MP. (Ketua) dan Dr. Mustofa Lutfi (Anggota).

Sesuai lingkup AIM UKPPA Siklus 8 Tahun 2015, Tim Auditor Internal melakukan evaluasi tindaklanjut atas temuan AIM UKPPA sebelumnya dan melakukan evaluasi pemenuhan Standar Mutu UB, serta evaluasi pemenuhan Standar Website UKPPA.

Saat AIM UKPPA Siklus 7 Tahun 2014 dan Siklus 6 Tahun 2013, BK mendapatkan temuan KTS di bidang Website tentang (1) Sistem dokumentasi, ringkasan hasil audit eksternal dan internal serta ringkasan tinjauan manajemen belum dicantumkan pada website; (2) Jenis layanan dan ringkasan hasil kegiatan/layanan belum dimasukkan dalam website; (3) Nilai belum maksimal karena belum ada konten, prestasi, IK, hasil audit dan tindakan, Tinjauan Manajemen, Ringkasan hasil kegiatan.

Namun demikian, pada saat visitasi AIM Siklus 8 temuan tersebut masih berstatus open dikarenakan belum semua temuan ditindaklanjuti. BK mendapatkan 7 temuan (KTS) untuk Standar Mutu, 4 temuan (KTS) dan 4 saran (OBS) untuk Standar Website. Temuan dan saran tersebut masih ditindaklanjuti dikarenakan tidak hanya terkait di BK saja tetapi juga terkait UKPPA yang lain.

Sedangkan untuk lingkup audit pemenuhan Standar Mutu UB, BK bertanggungjawab terhadap pemenuhan 28 butir standar mutu berikut:

Tabel 1. Daftar Standar Mutu untuk Lingkup Tugas BK

NO	KODE	Uraian Butir Mutu
Tujuan, Sifat, dan Ruang Lingkup Standar Mutu		
1	SM-UKPPA-A01	Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA)
2	SM-UKPPA-A03	Pemenuhan semua layanan di Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA)
Standar Pengelolaan Pendidikan		
3	SM-UKPPA-H08	UB membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan rencana strategis.
4	SM-UKPPA-H09	Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan ke dan mengikat seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan
5	SM-UKPPA-H10	UB membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan
6	SM-UKPPA-H14	Implementasi penjaminan mutu dibuktikan dengan adanya alokasi dana khusus yang sangat mendukung program penjaminan mutu internal dan akreditasi secara berkelanjutan
7	SM-UKPPA-H16	Setiap unit kerja harus memiliki bukti-bukti program yang terintegrasi dan sejalan dengan rencana strategi universitas/fakultas/program dan ada bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dalam bentuk laporan.
8	SM-UKPPA-H17	Terdapat bukti yang menunjukkan adanya dokumen tentang: (1) Manual Prosedur (MP) mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan universitas/fakultas/program; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan universitas/fakultas/program; (3) laporan bulanan/ semesteran mengenai hasil monitoring dan evaluasi; (4) tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi
9	SM-UKPPA-H18	Universitas/fakultas/program wajib memiliki (1) rancangan dan analisa jabatan; (2) uraian tugas; (3) prosedur kerja; (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja. Menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
Standar Pembiayaan Pendidikan		
10	SM-UKPPA-I01	Penggunaan total dana untuk kegiatan operasional yang terdiri dari kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut (1) Program Studi S-1 lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun. (2) Program Studi S-2 dan S-3 lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.
11	SM-UKPPA-I02	Universitas/fakultas/program harus memiliki kecukupan dana untuk memenuhi seluruh keperluan operasional dan pengembangan sarana dan prasarana.
12	SM-UKPPA-I03	Universitas/fakultas/program harus melakukan upaya pengembangan dan penanggulangan kekurangan dana

NO	KODE	Uraian Butir Mutu
13	SM-UKPPA-I04	Standar satuan biaya operasional pendidikan UB ditetapkan oleh Rektor UB secara periodik berdasarkan Standar Mutu UB dengan mempertimbangkan (a) Capaian Standar Mutu UB (b) Jenis Program Studi
14	SM-UKPPA-I05	Rektor bertanggung jawab terhadap akuntabilitas penerimaan dan penggunaan dana pendidikan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran
15	SM-UKPPA-I06	Rektor mengikhtisarkan dan melaporkan penggunaan dana pendidikan UB menurut perundang-undangan yang berlaku
16	SM-UKPPA-I07	Setiap tahun satuan pendidikan di tingkat fakultas dan universitas wajib melakukan evaluasi sebagai bentuk pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan standar pembiayaan.
17	SM-UKPPA-I08	Universitas/fakultas/program wajib menyusun laporan audit keuangan berkala yang memuat kehandalan sumber pendanaan dengan transparan, dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan hasilnya ditindaklanjuti oleh universitas/fakultas/program
18	SM-UKPPA-I09	Universitas Brawijaya memiliki laporan auditor yang kompeten yang menggambarkan perbandingan antara alokasi dana pengembangan akademik dengan dana untuk aspek lain yang digunakan sebagai patokan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana institusi lebih dari 25%.
19	SM-UKPPA-I10	Universitas Brawijaya memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang, yang dilakukan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti
20	SM-UKPPA-I11	Universitas Brawijaya memiliki mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan pemangku kepentingan
21	SM-UKPPA-I12	Universitas/fakultas/program mampu memperoleh dukungan dana lebih dari 25% dari total dana yang berasal dari dana masyarakat di luar SPP. Dana tersebut merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
22	SM-UKPPA-L01	Jumlah alokasi dana penelitian adalah 20% dari total anggaran belanja tahunan UB yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Standar Capaian Penelitian		
23	SM-UKPPA-O12	Program Studi S-1 rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 3 juta per dosen per tahun
24	SM-UKPPA-O13	Program Studi S-2 dan S-3 rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen per tahun
Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat		
25	SM-UKPPA-R01	Jumlah alokasi dana PPM sebesar 10% dari total anggaran belanja tahunan UB yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
26	SM-UKPPA-R02	Program Studi S-1 rata-rata dana PPM lebih dari Rp 1.500.000,00 per dosen per tahun

NO	KODE	Uraian Butir Mutu
27	SM-UKPPA-R03	Program Studi S-2 dan S-3 rata-rata dana PPM lebih dari Rp 2.500.000,00 per dosen per tahun
Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat		
28	SM-UKPPA-T02	Besaran dan proporsi dana/ funding yang diperoleh dari dana institusi di luar UB sebanyak >25% per tahun dari total dana PPM.

Dari 28 butir SM UB tersebut, BK dapat memenuhi 21 butir. Adapun butir standar yang belum bisa dipenuhi adalah:

- a. Butir ke-21 (SM-UKPPA-I12), hal ini karena sebagian besar pendapatan masih dari pendapatan SPP.
- b. Butir ke-22 (SM-UKPPA-L01), hal ini karena data ada di LPPM dan Fakultas.
- c. Butir ke-24 (SM-UKPPA-O13), hal ini karena data ada di LPPM dan Fakultas.
- d. Butir ke-25 (SM-UKPPA-R01), hal ini karena data ada di LPPM dan Fakultas.
- e. Butir ke-26 (SM-UKPPA-R02), Dosen tidak membedakan Pengabdian Masyarakat Prodi S1, S2 dan S3.
- f. Butir ke-27 (SM-UKPPA-R03), hal ini karena Prodi S2 dan S3 tidak ada dana Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Butir ke-28 (SM-UKPPA-T02), hal ini karena BK tidak menghitung % dana dari institusi luar UB terhadap dana PkM.

2. *Surveillance Visit 1 & 2 ISO 9001:2008 oleh LRQA*

Pada pelaksanaan SV 1 & 2 pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, BK dievaluasi kembali oleh Asesor Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). Pada kunjungan tersebut asesor yang bertugas di BK adalah Anton Nurkholis yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 5 BK.

Hasil evaluasi sistem dan implementasi ISO 9001:2008 menunjukkan bahwa kinerja BK menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya program dan hasil program yang nyata berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan program tersebut, menurut asesor LRQA, dapat ditunjukkan dari opini KAP terhadap Laporan Keuangan UB yang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain hasil evaluasi positif tersebut di atas, BK juga memperoleh evaluasi untuk peningkatan proses dan kinerja (OBS), yaitu bahwa BK mengevaluasi dan memonitoring daya serap terhadap Pagu DIPA yang masih rendah, merekomendasikan survey

kepuangan pelanggan agar lebih detail dan rekomendasi untuk memperbaiki website BK sesuai dengan struktur yang baru, serta perbaikan MP sesuai dengan OTK terbaru.

3. Umpan Balik Pelanggan

Secara umum, umpan balik pelanggan diperoleh dari pihak internal UB. Umpan balik pihak internal UB diperoleh melalui instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu instrumen IKM yang disusun oleh Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) UB.

Hasil evaluasi IKM di BK menunjukkan bahwa pelayanan BK sangat baik dan perlu dipertahankan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IKM untuk BK sebesar 81,67 (Standar Nilai A = > 81,26) (Tabel 2).

Tabel 2. Nilai Indek Kepuasan Pelanggan per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur pelayanan	
1	Kesesuaian Persyaratan	3.43	A
2	Kemudahan Prosedur	3.00	B
3	Kecepatan Pelayanan	3.57	A
4	Ketepatan waktu layanan	3.00	B
5	Kesesuaian biaya	3.14	B
6	Hasil Layanan	3.00	B
7	Kemampuan SDM	3.29	A
8	Sikap SDM	3.29	A
9	Layanan sesuai Maklumat Layanan	3.29	A
10	Penanganan Pengaduan	3.67	A
Total Nilai IKM		81.67	
Nilai Mutu Pelayanan		A	
Kinerja Unit pelayanan		SANGAT BAIK	

4. Kinerja dan Evaluasi Proses BK

Kinerja proses BK dapat diukur dari capaian program kerja dan capaian sasaran mutu atau indikator kinerja. Setiap program kerja dapat diukur capaiannya untuk bahan evaluasi penyusunan program selanjutnya. Dari pengukuran setiap bagian di BK, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Program Kerja BK 2015 sebesar 75%. Secara umum, sebagian program telah terlaksana dengan baik, namun evaluasi dan tindaklanjutnya

belum selesai dikerjakan. Berikut ini disajikan rata-rata capaian program per bagian (Tabel 3).

Tabel 3. Persentase Capaian Program Kerja BK 2015

No.	Program Kerja	Skor Capaian
A.	Program Bagian Akuntansi	
1.	Kegiatan Rekon KPPN	80 %
2.	Kegiatan Laporan SAK	90 %
3.	Kegiatan Laporan SAP	90 %
4.	Kegiatan Rekon SIMAK-BMN dan Persediaan	80 %
5.	Kegiatan Audit KAP	100 %
6.	Kegiatan Monev	90 %
B.	Program Bagian Anggaran dan Perbendaharaan	
1.	Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 %
2.	Kegiatan Pembayaran UP	80 %
3.	Kegiatan Pembayaran LS	70 %
4.	Kegiatan Pembayaran GUP	80 %
5.	Kegiatan Pembayaran TUP	80 %

Program kerja bagian Akuntansi yang tidak mencapai 100% dikarenakan pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan Kementerian yang semula UB di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan Program bagian Anggaran dan Perbendaharaan tidak mencapai 100% dikarenakan masih banyak terjadi pengembalian dokumen pendukung dalam pelaksanaan pembayaran UP/LS/GUP/TUP.

Beberapa indikator kinerja BK juga belum bisa diukur, karena untuk saat ini program yang terkait dengan capaian indikator tersebut belum terlaksana dengan baik. Rata-rata capaian yang rendah tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan terprogram yang belum terlaksana karena prioritas kegiatan institusi diluar tugas-fungsi BK memerlukan sumberdaya untuk penyelesaiannya.

Beberapa tugas tambahan diluar tuisi tersebut antara lain pembahasan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis UB, membantu Rektor merumuskan capaian kontrak kinerja dengan Kemenkeu, membantu Rektor merumuskan remunerasi. Berikut ini (Tabel 4) disampaikan rincian capaian indikator kinerja BK.

No.	Sasaran Mutu atau Indikator Kinerja	Baseline	Target Th.2015	Capaian Th.2015
1.	Opini terhadap LK	WTP	WTP	WTP
2.	Daya serap pagu DIPA	95 %	98 %	95.3 %
3.	Penyerapan dana DIPA PNBPN	95 %	97 %	84.18 %
4.	Penyerapan dana DIPA RM	99 %	99 %	95.38 %
5.	Layanan Pencairan Dana UP/GUP/LS/TUP	3 hari	1 hari	2 hari
6.	Kepuasan Pelanggan	75 %	80 %	81.67 %

Penyampaian penyerapan terhadap pagu DIPA, dana PNBPN dan dan RM tidak mencapai target dikarenakan adanya efisiensi di belanja modal dan perjalanan dinas. Sedangkan efektifitas layanan pencairan dana dikarenakan terjadinya pengembalian dokumen pendukung pencairan dana oleh sebab itu target ini akan dievaluasi kembali.

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan

Secara umum, masukan untuk tindakan koreksi di BK diperoleh dari evaluasi keluhan, evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja dan evaluasi sasaran mutu. Rincian tindakan koreksi dan tindakan pencegahan tersebut disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

No.	Masukan	Tindakan Perbaikan	Status (Open/ Closed)	Tindakan Pencegahan
A.	Keluhan			
1.	Penyediaan prosedur sesuai dengan pelaksanaan	Memperbaiki prosedur yang ada	open	Melakukan evaluasi prosedur setiap tahun
B.	Evaluasi Kepuasan			
1.	Penyediaan informasi layanan	Memperbaiki dan menyiapkan layanan yang diperlukan	open	Melakukan evaluasi layanan yang dilakukan setiap tahun
C.	Temuan Audit (termasuk yang eksternal)			
1.	Website kurang update	Melakukan update website	open	Menugaskan MR untuk memantau updating website BK secara berkala
2.	Tinjauan manajemen belum sesuai ISO 9001:2008	Menyusun tinjauan manajemen yang	open	Melakukan evaluasi terhadap

		sesuai dengan ISO 9001:2008		tinjauan manajemen
D.	Evaluasi Program Kerja			
1.	Capaian program kerja dan kesesuaian jadwal masih rendah	Meningkatkan kinerja dan berusaha mematuhi jadwal yang telah direncanakan	open	Melakukan pemantauan dan pertimbangan terhadap segala aspek secara berkala
E.	Evaluasi Sasaran Mutu			
1.	Beberapa sasaran mutu belum mencapai target	Melakukan pemantauan sasaran mutu	open	Melakukan evaluasi secara berkala

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
1.	Perlu ada evaluasi dan perbaikan system dan prosedur layanan bagi <i>stakeholders</i> eksternal	MR	Sebagian sistem sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan	Adanya perubahan struktur dan kurangnya personil	Menambah jumlah personil
2.	Tinjauan manajemen belum sesuai ISO 9001:2008	MR	Menyusun tinjauan manajemen yang sesuai dengan ISO 9001:2008	Kekurangan data untuk mendukung penyusunan	Perbaikan penyusunan tinjauan manajemen

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM

Pada prinsipnya, ada dua hal yang mempengaruhi SMM di BK, yaitu adanya peraturan baru di tingkat nasional dan adanya perubahan struktur organisasi di UB.

Perubahan di tingkat nasional yang mempengaruhi secara tidak langsung adalah perubahan nomenklatur perguruan tinggi, yaitu dari (032) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi (042) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perubahan nomenklatur ini menyebabkan UB yang dulunya di bawah 1 (satu) Direktorat Jenderal (032.04) Ditjen Pendidikan Tinggi setelah perubahan UB dibebani fungsi untuk melaksanakan mandat dari 4 (empat) Direktorat Jenderal (042.01) Sekretariat Jenderal), (042.03) Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, (042.04) Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (042.05) Ditjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI.

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM

Secara umum, masukan-masukan dari pelanggan dan hasil kajian BK untuk peningkatan SMM di BK adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya melakukan optimalisasi penggunaan website BK sebagai media penyampaian informasi yang detil dan akurat.*
- b. Perlunya penyusunan program kerja yang detil dengan penjadwalan yang baik dan persiapan yang matang.*
- c. Evaluasi capaian program dan capaian sasaran mutu harus dipantau secara periodik.*
- d. Perlu segera mengevaluasi dan memperbaiki prosedur yang ada dengan relevansi pelaksanaan program yang ada saat ini.*

V. PENUTUP

Berdasarkan kajian sistem manajemen BK seperti tertuang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem di BK cukup efektif, hal ini terbukti dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas BK dapat terlaksana. Adanya program dan capaian sasaran mutu yang tercapai merupakan ukuran efektifitas yang baik.

Capaian tersebut, meskipun belum sempurna, adalah hasil kerja keras seluruh personil BK. Dalam keterbatasan sumberdaya manusia, BK masih mampu melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen.